



## ***DIRECT REGIONAL HEAD ELECTION: ASSESSING THE IMPACT ON LEADERSHIP QUALITY AND COMMUNITY PARTICIPATION***

### **PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: MENILAI DAMPAKNYA TERHADAP KUALITAS KEPEMIMPINAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT**

**Deni Syaputra<sup>1</sup>, Yusmiarni<sup>2</sup>, Febby Febriani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Prodi Ilmu Hukum, ITS Khatulistiwa

E-mail: [deni\\_piliang@yahoo.com](mailto:deni_piliang@yahoo.com)<sup>1</sup>, [yusmiarni04@gmail.com](mailto:yusmiarni04@gmail.com)<sup>2</sup>, [bibbyono18@gmail.com](mailto:bibbyono18@gmail.com)<sup>3</sup>

#### **ARTICLE INFO**

##### ***Correspondent***

**Deni Syaputra**

[deni\\_piliang@yahoo.com](mailto:deni_piliang@yahoo.com)

##### **Key words:**

***Direct Regional Head Election, Leadership Quality, Participation Public***

##### **Website:**

***<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>***

**Page: 1126 - 1137**

#### **ABSTRACT**

*The focus of the problem is regarding the title "direct regional head election: Assessing the Impact on Leadership Quality and Community Participation." There are several objectives for this research which consist of: What is the impact of direct regional head elections on the quality of leadership, what is the impact on community participation, and what factors influence the quality of leadership and community participation. The research method used in this research uses the library research method (library study), namely using sources through books, journals, statutory regulations.*

*Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.*

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
<p><b>Koresponden</b>  <b>Deni Syaputra</b>  <i>deni_piliang@yahoo.com</i></p> <p><b>Kata kunci:</b>  <b>Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Kualitas Kepemimpinan, Partisipasi Masyarakat</b></p> <p><b>Website:</b>  <a href="https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER">https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER</a></p> <p><b>Hal: 1126 - 1137</b></p>	<p>Fokus permasalahan mengenai judul “Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Menilai Dampaknya terhadap Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat. Ada beberapa tujuan penelitian ini dilakukan yang terdiri dari: Apa dampak pemilihan kepala daerah langsung terhadap kualitas kepemimpinan, bagaimana dampak terhadap partisipasi masyarakat, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode library research (studi pustaka), yaitu menggunakan sumber melalui buku, jurnal, peraturan perundang-undangan.</p> <p style="text-align: right;"><i>Copyright © 2024 JSER. All rights reserved.</i></p>

## PENDAHULUAN

Pemilihan kepala daerah langsung merupakan salah satu elemen penting dalam sistem demokrasi Indonesia yang diimplementasikan setelah Reformasi 1998 bergulir. Sebelum adanya pemilihan langsung, kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga berdampak tingkat partisipasi masyarakat hampir tidak ada serta meningkatkan peluang terjadinya praktek politik yang kurang transparan. Bung Hatta mengatakan kedaulatan rakyat berarti pemerintahan rakyat (Santoso, 2009). Akan tetapi, menurut Rozali Abdullah, oleh karena Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Republik Indonesia, maka dalam melakukan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah seharusnya sinkron dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, yaitu melalui pemilihan langsung (Abdullah, 2005). Pemerintahan yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang dipercayai oleh rakyat Dengan diberlakukannya pemilihan kepala daerah langsung, sehingga rakyat memiliki hak untuk secara langsung memilih pemimpin mereka, yang diharapkan dapat memperkuat demokrasi, akuntabilitas, dan transparansi pemerintahan daerah.

Sehingga muncul keinginan pemilihan secara langsung sebagai aktualisasi kehendak rakyat dalam menentukan pilihan, Ide dasar teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara, yang lain tidak (Nurtjahyo, 2006). Rakyat berkuasa independen atas dirinya sendiri Pemilihan langsung memungkinkan masyarakat untuk memiliki suara dalam menentukan pemimpin yang mereka anggap layak untuk memimpin dan mengelola daerah mereka, yang seharusnya menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat. Dalam konteks ini, pemilihan langsung diharapkan bukan hanya memperkuat demokrasi lokal, tetapi juga meningkatkan kualitas pemerintahan daerah melalui pemimpin yang terpilih berdasarkan suara rakyat, bukan berdasarkan pertimbangan politis atau oligarkis.

Sebelum pemilihan langsung diberlakukan, kepala daerah di Indonesia dipilih oleh DPRD, hal tersebut sering kali dipandang tidak cukup mewakili keinginan masyarakat. Dimana setiap warga negara mempunyai hak-hak yang sama dan implementasinya hak dan kewajiban pun harus bersama-sama (Setiardja, 1993), terutama di masa Orde Baru, sistem ini memberi kesempatan bagi kekuatan politik di tingkat pusat untuk mengontrol kekuasaan daerah. Namun, setelah Reformasi 1998, Indonesia mulai mengadopsi sistem demokrasi yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip "*one person, one vote*". Melalui perubahan tersebut, pemilihan kepala daerah langsung dimulai pada tahun 2005 lewat lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kemudian Undang-undang No. 32 Tahun 2004 ini diperbarui dengan lahirnya Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Alasan utama di balik penerapan pemilihan kepala daerah langsung adalah untuk memberikan kekuatan kepada rakyat untuk memilih langsung pemimpin daerah mereka, sehingga memperkuat akuntabilitas pemimpin daerah terhadap rakyatnya. Tepat kiranya apa yang pernah dilontarkan Alexis de Tocqueville yang menyatakan: Demokrasi memang tidak memberikan kepada rakyatnya pemerintahan yang paling cakap, melainkan lebih tepatnya menghasilkan apa yang kerap kali tak dapat diciptakan oleh pemerintahan-pemerintahan yang paling cakap (Revitch & Thernstrom, 2005). Demikian juga dengan demokrasi merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang paling baik, walaupun ia sebagai pilihan yang buruk dan sistem pemerintahan yang paling baik, walau ia sebagai pilihan buruk dan sistem pemerintahan yang terburuk yang pernah ada dibelahan dunia" (Hungtington, 2005). Selanjutnya pemilihan langsung juga bertujuan untuk mengurangi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang mungkin timbul dari sistem pemilihan tidak langsung, di mana hubungan antara kepala daerah dan DPRD lebih didominasi oleh kepentingan politis.

Menurut Jimly Asshiddiqie perkataan "dipilih secara demokratis" ini bersifat luwes, sehingga mencakup pengertian pemilihan langsung oleh rakyat ataupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seperti yang pada umumnya sekarang dipraktikkan di daerah-daerah berdaarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku (Asshiddiqie, 2002). Meskipun pemilihan kepala daerah langsung diharapkan membawa dampak positif, pelaksanaannya tidak bebas dari berbagai tantangan. Salah satu problematika utama yang muncul adalah kualitas kepemimpinan. Pemilihan langsung, meskipun memberikan hak suara kepada rakyat, tidak selalu menjamin terpilihnya kepala daerah yang kompeten dan berkualitas. Seringkali, para calon kepala daerah lebih mengutamakan aspek popularitas, dana, dan dukungan partai politik daripada rekam jejak di pemerintahan yang baik. Hal ini bisa berujung pada terpilihnya pemimpin yang kurang memahami kompleksitas administrasi pemerintahan dan tidak mampu menjalankan program-program pembangunan yang efektif.

Disamping hal tersebut diatas, pemilihan kepala daerah langsung juga menghadirkan permasalahan terutama dalam hal partisipasi masyarakat. Meskipun diharapkan bisa meningkatkan partisipasi, dalam prakteknya banyak daerah yang menghadapi tingkat partisipasi yang rendah, terutama pada daerah-daerah yang jauh dari pusat kota atau daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah. Pengaruh uang politik, ketidakmerataan informasi politik, dan faktor-faktor sosial lainnya sering kali mempengaruhi bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini menimbulkan pertanyaan

apakah sistem pemilihan langsung benar-benar mendorong partisipasi yang inklusif dan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam proses politik.

Selain itu, dinamika dalam partai politik yang mendominasi dalam pemilihan kepala daerah sering kali membuat proses seleksi calon kepala daerah lebih bergantung pada kepentingan politik daripada keinginan masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Pola politik uang, manipulasi suara, dan kurangnya transparansi juga menjadi masalah serius yang dapat merusak esensi dari pemilihan kepala daerah langsung sebagai mekanisme demokrasi yang bersih dan adil.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data atau penulisan ilmiah yang ditujukan pada objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat perpustakaan. Penelitian ini dikatakan penelitian kepustakaan karena pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai literatur. Persiapan penelitian memerlukan bahan-bahan yang bersumber dari perpustakaan, antara lain buku, majalah, dan bahan dokumenter lainnya (Sari, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber primer. Sumber primer adalah sumber yang sesuai dengan peneliti penelitian. Dokumen lainnya adalah Peraturan Perundang-undangan, kumpulan buku, jurnal, majalah, dan lain-lain yang berkaitan dengan "PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG: Menilai Dampaknya terhadap Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat". Pengumpulan data dilakukan dengan teknik penelitian kepustakaan (*library research*) (Supriyadi, 2017).

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif dan analisis isi dengan mengacu pada permasalahan yang ada. Setelah mengumpulkan sumber dan melakukan verifikasi (keabsahan sumber) mengenai topik penulis, penulis melakukan analisis atau elaborasi dan dilanjutkan dengan sintesis atau penyatuan. Sehingga data yang diperoleh mempunyai isi dan fakta yang teruji kebenarannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Kualitas Kepemimpinan**  
Pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang lebih kompeten, transparan, dan akuntabel. Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam pemilihan kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pimpinannya (Ramses, 2023)<sup>1</sup>. Meskipun diharapkan membawa dampak positif terhadap kualitas kepemimpinan, pelaksanaannya menunjukkan bahwa hasilnya tidak selalu sesuai dengan tujuan tersebut. Berikut adalah analisis terkait dampak pemilihan langsung terhadap kualitas kepemimpinan:

### **1. Analisis Apakah Pemilihan Langsung Menghasilkan Kepala Daerah yang Lebih Berkualitas (Kompeten, Transparan, Akuntabel)**

Pemilihan langsung memang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka secara langsung, namun, dalam prakteknya, hasil

---

<sup>1</sup> Andy Ramses, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-undang Nomor 22 tahun 1999*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003

dari pemilihan ini tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas. Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pemimpin yang terpilih antara lain:

*faktor kompetensi*, Kompetensi adalah faktor penting dalam mendapatkan kredibilitas. Pemimpin yang kompeten dalam bidangnya menunjukkan pemahaman dan keahlian yang diperlukan untuk memimpin (Pranita, 2023)<sup>2</sup>. dimana pemilihan kepala daerah langsung sering kali lebih menekankan pada popularitas calon ketimbang kompetensi mereka dalam mengelola pemerintahan daerah. Hal ini disebabkan oleh kampanye politik yang lebih fokus pada pencitraan daripada pemaparan tentang kemampuan dan pengalaman calon dalam mengelola pemerintahan. Sejumlah kepala daerah yang terpilih mungkin tidak memiliki latar belakang atau keahlian di bidang pemerintahan, sehingga berdampak pada efektivitas pemerintahan mereka setelah terpilih.

*Faktor transparansi*, dalam beberapa kasus, pemilihan langsung dapat mengarah pada kekurangan transparansi dalam proses seleksi calon kepala daerah. Bahwa kecurangan yang terjadi pada pemilu merupakan bentuk dari pelanggaran (Juwita, 2023)<sup>3</sup> Meskipun calon kepala daerah terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung, proses seleksi yang melibatkan politik uang atau kesepakatan belakang layar sering kali terjadi, yang mengurangi aspek transparansi dalam sistem ini. Politik uang (money politics) juga menjadi faktor yang mengurangi transparansi dalam pemilihan kepala daerah, di mana calon-calon tertentu dapat memenangkan pemilu dengan mengandalkan kekuatan finansial daripada kejelasan visi dan misi mereka untuk daerah.

*Fektor akuntabilitas*, dalam pemilihan kepala daerah langsung seharusnya meningkatkan akuntabilitas kepala daerah terhadap rakyat. Namun, meskipun kepala daerah terpilih oleh rakyat, tetap saja ada tantangan besar dalam memastikan kepala daerah tersebut bertanggung jawab terhadap kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah. Hubungan antara kepala daerah dan legislatif sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang bisa mengurangi kemampuan kepala daerah untuk bekerja secara independen dan bertanggung jawab.

## **2. Keterkaitan Antara Pemilihan Langsung dan Profesionalisme dalam Pemerintahan Daerah**

Pemilihan kepala daerah langsung diharapkan dapat membawa *profesionalisme* dalam pemerintahan daerah, di mana kepala daerah terpilih didorong untuk lebih fokus pada pengelolaan administrasi dan pelayanan publik. Namun, kenyataannya, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, antara lain adalah sebagai berikut:

*Pertama pengaruh partai politik*, didalam banyak kasus, profesionalisme kepala daerah terpilih terhalang oleh pengaruh *partai politik*. Pemilihan langsung sering kali didominasi oleh dukungan politik dari partai besar yang lebih menekankan pada *kepentingan politik* daripada kemampuan manajerial calon. Hal ini membuat kepala daerah lebih fokus pada *politik jangka pendek* dan

---

<sup>2</sup> Dian Jani Pranita, dkk, *Strategi Kememimpinan*, Journal Corner And Publishing, Cilacap, Cetakan I 2023

<sup>3</sup> Juwita, dkk *Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi*, MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023, Hal 477

pengaruh partai politik daripada mengelola daerah dengan cara yang lebih profesional.

*Kedua keterbatasan sumber daya dan pengalaman calon kepala daerah*, tidak semua kepala daerah yang terpilih melalui pemilihan langsung memiliki pengalaman atau pelatihan yang cukup dalam mengelola pemerintahan daerah. Ini menjadi tantangan besar dalam menciptakan pemerintahan daerah yang lebih profesional, karena mereka membutuhkan waktu dan sumber daya untuk membangun kapasitas administrasi yang baik.

*Ketiga pengaruh politik uang*, seiring dengan meningkatnya biaya dalam pemilihan kepala daerah, beberapa kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme pemilihan langsung mungkin lebih mengutamakan *pendanaan kampanye* dan *politik uang*, yang bisa mengurangi integritas dan profesionalisme mereka dalam mengelola pemerintahan daerah.

### **3. Tantangan dan Hambatan dalam Memilih Kepala Daerah yang Berkualitas Melalui Mekanisme Pemilihan Langsung**

Meskipun pemilihan kepala daerah langsung bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas, beberapa tantangan dan hambatan muncul, diantara banyaknya tantangan tersebut beberapa diantaranya adalah sebagai berikut;

Politik Uang (*Money Politics*), salah satu tantangan terbesar dalam pemilihan kepala daerah langsung adalah *political money* atau politik uang. Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam era liberalisasi politik dengan kekuatan partai politik yang dominan, memungkinkan sekali yang bias bertempur di sana adalah mereka yang memiliki *capital ekonomi* dan politik yang kuat (Amirudin & Bisri<sup>4</sup>). Calon kepala daerah yang memiliki sumber daya finansial yang besar sering kali bisa memenangkan pemilihan meskipun mereka tidak memiliki kualitas kepemimpinan yang memadai. Ini bisa mengarah pada korupsi dan kebijakan yang tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Popularitas dan Kompetensi, Pemilihan langsung sering kali lebih mengutamakan popularitas daripada kompetensi. Masyarakat cenderung memilih calon yang lebih dikenal/populer, meskipun mereka kurang memiliki latar belakang atau keahlian dalam mengelola pemerintahan daerah. Ini menjadi masalah besar dalam memilih pemimpin yang benar-benar memiliki kapasitas untuk memimpin dan mengelola daerah secara profesional.

*Fragmentasi Politik*, di beberapa daerah, fragmentasi politik juga menghambat pemilihan kepala daerah yang berkualitas. Adanya banyaknya calon dari berbagai partai politik dan kelompok membuat pemilih kesulitan untuk memilih calon yang benar-benar kompeten dan berintegritas.

*Keterbatasan Akses Informasi*, banyak pemilih yang memiliki keterbatasan dalam akses informasi tentang calon kepala daerah, terutama di daerah-daerah terpencil. Hal ini membuat pemilih sulit untuk menilai kualitas calon secara objektif, dan seringkali hanya bergantung pada citra atau narasi yang dibangun oleh tim kampanye.

---

<sup>4</sup> Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2006, hal.29

## **Dampak Pemilihan Kepala Daerah Langsung terhadap Partisipasi Masyarakat**

Pemilihan kepala daerah secara langsung bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pemerintahan lokal. Namun, dampaknya terhadap partisipasi masyarakat bisa bervariasi, tergantung pada berbagai faktor. Mulai dari tingkat partisipasi, pengaruh pemilihan langsung terhadap partisipasi politik di luar pemilu, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat tersebut, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung**

Pemilihan kepala daerah secara langsung memberikan hak suara kepada rakyat untuk memilih pemimpin mereka, yang secara teori dapat meningkatkan partisipasi politik. Namun, tingkat partisipasi ini sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, baik dari sisi individu (pemilih) maupun dari sisi sistem (proses pemilihan).

**Tingkat Partisipasi Pemilih**, tingkat partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah dapat bervariasi secara signifikan, tergantung pada daerah dan faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat. Secara umum, tingkat partisipasi di Indonesia pasca-pemilihan langsung cenderung mengalami fluktuasi. Di beberapa daerah, tingkat partisipasi cukup tinggi, sementara di daerah lain, partisipasi pemilih bisa sangat rendah.

**Pengaruh Pemilu Legislatif**, pemilihan kepala daerah seringkali berlangsung bersamaan dengan pemilu legislatif, yang bisa memengaruhi partisipasi. Ketika pemilu kepala daerah dilakukan terpisah dari pemilu legislatif atau nasional, partisipasi sering kali lebih rendah karena pemilih merasa kurang terlibat atau kurang tertarik pada calon-calon lokal.

**Kepedulian Terhadap Pemimpin Lokal**, pemilihan kepala daerah langsung memungkinkan masyarakat untuk memilih pemimpin yang lebih dekat dengan mereka, yang secara teori dapat meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi mereka. Namun, beberapa survei menunjukkan bahwa meskipun kepala daerah dipilih langsung, banyak warga masih kurang tertarik atau tidak aktif dalam memilih karena kurangnya pengetahuan atau keterlibatan dalam proses politik.

### **2. Pengaruh Pemilihan Langsung terhadap Partisipasi Politik di Luar Pemilu (Kegiatan Politik Lokal, Pengawasan Pemerintah Daerah)**

Salah satu tujuan dari pemilihan kepala daerah langsung adalah untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat tidak hanya pada saat pemilihan berlangsung, tetapi juga dalam kehidupan politik lokal yang lebih luas. Meskipun sistem pemilihan langsung memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih pemimpin mereka, ada beberapa pengaruh terhadap partisipasi politik setelah pemilu yang perlu dianalisis, diantaranya adalah sebagai berikut:

**Partisipasi dalam Kegiatan Politik Lokal**, pemilihan kepala daerah langsung dapat memperkuat *keterlibatan masyarakat dalam politik lokal*, seperti dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan daerah, musyawarah perencanaan pembangunan, dan diskusi kebijakan publik. Namun, meskipun ada peningkatan kesadaran politik di tingkat lokal, sering kali warga merasa tidak punya cukup saluran untuk berpartisipasi aktif setelah pemilihan selesai. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik lokal sering kali terbatas pada isu-isu yang sangat spesifik dan terhubung langsung dengan kesejahteraan mereka, seperti masalah pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan

pelayanan kesehatan. Namun, hal ini bergantung pada sejauh mana masyarakat merasa bahwa pemerintah daerah benar-benar memperhatikan suara mereka.

*Pengawasan Pemerintah Daerah*, pemilihan langsung juga diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih *aktif mengawasi pemerintahan daerah*. Ketika kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat, diharapkan mereka akan lebih bertanggung jawab kepada masyarakat dan lebih transparan dalam menjalankan pemerintahan. Namun, meskipun ada ekspektasi bahwa pemilihan langsung akan meningkatkan pengawasan masyarakat terhadap kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah, kenyataannya pengawasan ini sering kali tidak maksimal. Faktor yang memengaruhi pengawasan termasuk rendahnya pendidikan politik masyarakat, kurangnya akses informasi yang transparan, serta ketergantungan pada pemerintahan lokal yang masih kuat.

### 3. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah secara langsung tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan pemilihan itu sendiri, tetapi juga oleh berbagai faktor yang memengaruhi *motivasi untuk memilih*, dari banyak faktor diantaranya adalah sebagai berikut:

*Faktor Sosial-Ekonomi*, masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang lebih tinggi cenderung memiliki partisipasi yang lebih tinggi dalam pemilihan. Mereka memiliki akses yang lebih baik terhadap informasi politik dan cenderung lebih peduli dengan kualitas pemerintahan daerah. Sebaliknya, masyarakat di daerah yang lebih miskin atau terpinggirkan sering kali kurang memiliki akses informasi tentang calon kepala daerah dan proses pemilihan, yang dapat menurunkan tingkat partisipasi mereka.

*Faktor Akses Informasi*, *media massa* dan *akses teknologi* (seperti internet dan media sosial) memainkan peran besar dalam meningkatkan partisipasi pemilih. Ketika masyarakat lebih mudah mengakses informasi tentang calon kepala daerah dan visi mereka, mereka cenderung lebih aktif dalam memilih. Di beberapa daerah yang kurang terjangkau oleh media, informasi politik seringkali tidak tersebar dengan baik, yang mengarah pada rendahnya partisipasi dalam pemilihan kepala daerah.

*Politik Uang (Money Politics)*, *politik uang* dapat mengurangi partisipasi politik yang sejati. Masyarakat yang merasa bahwa pemilihan hanya dapat dimenangkan oleh calon dengan dana besar mungkin merasa apatis atau tidak percaya bahwa suara mereka bisa membuat perubahan. Meskipun pemilihan langsung seharusnya memberi peluang yang lebih adil bagi semua calon, praktik politik uang masih menjadi hambatan besar bagi partisipasi yang sejati.

**Motivasi dan Kesadaran Politik**, **Kesadaran politik** masyarakat berperan penting dalam meningkatkan partisipasi. Masyarakat yang memiliki pengetahuan yang cukup tentang hak-hak mereka sebagai pemilih dan tentang calon-calon yang ada akan lebih termotivasi untuk ikut serta dalam pemilihan kepala daerah.

*Program sosialisasi* oleh pemerintah dan lembaga independen juga berperan dalam meningkatkan kesadaran politik ini.

#### **4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat**

Faktor-faktor yang memengaruhi kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat dapat dibagi menjadi dua kategori besar: faktor internal (berasal dari individu atau elemen internal masyarakat) dan faktor eksternal (berasal dari lingkungan sosial, politik, atau institusional). Beberapa faktor utama yang memengaruhi keduanya adalah media, pendidikan politik, dan peran partai politik<sup>5</sup>.

##### **a. Faktor Eksternal yang Mempengaruhi Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat**

- **Media, Media** berperan sebagai saluran informasi yang sangat penting dalam membentuk opini publik<sup>6</sup>, meningkatkan kesadaran politik masyarakat, serta mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Pengaruh media dapat dilihat dari dua sisi:

**Media Massa** (televisi, radio, surat kabar): Media massa memiliki kemampuan untuk menyebarkan informasi yang luas kepada masyarakat. Penggunaan media massa dalam kampanye pemilihan kepala daerah dapat meningkatkan pengetahuan publik tentang calon dan kebijakan mereka. Namun, ketergantungan pada media massa juga dapat menimbulkan bias media, di mana beberapa calon atau partai politik memiliki pengaruh lebih besar atas media, sehingga membentuk citra yang tidak sepenuhnya akurat.

**Media Sosial** (Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube): Media sosial menjadi kekuatan yang semakin dominan dalam pemilihan kepala daerah. Media sosial memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi lebih cepat dan langsung, namun juga dapat mempengaruhi kualitas informasi yang diterima masyarakat. Disinformasi, berita palsu, dan kampanye hitam sering tersebar di media sosial, yang dapat menurunkan kualitas diskursus politik dan mempengaruhi partisipasi politik secara negatif.

- **Pendidikan Politik, Pendidikan politik** berperan penting dalam membentuk kualitas kepemimpinan dan partisipasi politik masyarakat. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak politik mereka dan proses politik akan lebih aktif berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah dan kegiatan politik lainnya.

**Pendidikan Formal dan Informal:** Pendidikan politik dapat diberikan melalui lembaga pendidikan formal (sekolah, universitas) atau melalui kegiatan pendidikan politik informal seperti seminar, diskusi, dan media massa. Masyarakat yang teredukasi secara politik cenderung memiliki pengetahuan lebih dalam mengenai kandidat dan kebijakan, serta lebih paham mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu.

**Kualitas Pendidikan:** Pendidikan yang lebih baik memungkinkan individu untuk memahami mekanisme pemilu dan dampaknya terhadap kehidupan mereka, yang pada gilirannya mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif.

---

<sup>5</sup> <https://bpmbkm.uma.ac.id/2024/02/29/peran-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik-dan-sikap-politik/>, di unduh pada hari minggu, 09-02-2025

<sup>6</sup> <https://komunikasi.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/pengaruh-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik.html>, di unduh pada hari Senin, 10-02-2025

- **Peran Partai Politik Partai politik** memegang peran yang sangat penting dalam sistem politik Indonesia, termasuk dalam proses pemilihan kepala daerah. Peran partai politik tidak hanya terbatas pada mencalonkan kandidat, tetapi juga dalam membentuk agenda politik dan kebijakan publik yang memengaruhi masyarakat.

**Pencalonan dan Kampanye:** Partai politik yang kuat dapat mencalonkan kandidat yang memiliki dukungan yang luas dan memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kampanye yang efektif. Hal ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu karena mereka merasa lebih terhubung dengan calon yang diusung oleh partai yang mereka dukung.

**Politik Identitas dan Partisipasi:** Partai politik juga berperan dalam membentuk **identitas politik** masyarakat. Pemilih sering kali memilih calon berdasarkan afiliasi partai, yang dapat meningkatkan partisipasi di kalangan pemilih yang loyal terhadap partai politik tertentu.

#### **b. Faktor Internal yang Mempengaruhi Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat**

- **Motivasi dan Kesadaran Politik Individu,** Kesadaran politik dan motivasi untuk berpartisipasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman individu dan lingkungan sosial. Individu yang merasa memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap kondisi politik di sekitar mereka cenderung akan lebih aktif dalam partisipasi politik, baik dalam pemilihan kepala daerah maupun dalam pengawasan pemerintah.
- **Kesadaran Politik:** Kesadaran politik adalah elemen penting yang mempengaruhi seberapa besar seseorang ingin terlibat dalam proses politik. Individu yang memiliki pemahaman tentang hak-hak mereka dan mekanisme pemerintahan lebih cenderung untuk berpartisipasi dalam proses pemilihan.
- **Motivasi Sosial:** Beberapa individu mungkin termotivasi untuk berpartisipasi karena faktor sosial, seperti pengaruh teman sebaya atau komunitas mereka, yang mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam pemilihan atau kegiatan politik lainnya.

#### **c. Pengaruh Sosial dan Budaya**

- Faktor sosial dan budaya masyarakat juga memengaruhi partisipasi politik dan kualitas kepemimpinan. Norma sosial, nilai budaya, dan struktur sosial dapat menentukan seberapa besar masyarakat berperan dalam kegiatan politik.
- **Norma Sosial:** Di beberapa komunitas, norma sosial yang lebih kuat bisa mengarahkan individu untuk aktif berpartisipasi dalam pemilihan atau kegiatan politik. Sebaliknya, di beberapa masyarakat, partisipasi bisa terhambat oleh apatisme atau kurangnya motivasi politik.
- **Kepercayaan terhadap Pemerintah:** Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga politik sangat penting untuk mendorong partisipasi politik. Masyarakat yang merasa bahwa suara mereka dihargai dan memiliki dampak yang nyata lebih cenderung untuk terlibat dalam proses politik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa dampak pemilihan kepala daerah langsung terhadap kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat diatas dapat disimpulkan beberapa sebagai berikut :

1. Dampak terhadap Kualitas Kepemimpinan, Pemilihan kepala daerah langsung di Indonesia bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang lebih kompeten, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, pemilihan langsung sering kali lebih mengutamakan popularitas daripada kompetensi, yang berpotensi menghasilkan pemimpin yang kurang berkualitas. Faktor seperti politik uang, keterbatasan pengalaman calon, serta pengaruh partai politik mengurangi efektivitas pemilihan dalam menciptakan kepala daerah yang profesional dan akuntabel. Meskipun demikian, pemilihan langsung dapat meningkatkan akuntabilitas kepala daerah kepada masyarakat jika prosesnya dijalankan dengan transparan.
2. Dampak terhadap Partisipasi Masyarakat, Pemilihan kepala daerah langsung seharusnya dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam politik lokal. Namun, tingkat partisipasi pemilih sering kali bervariasi dan dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, akses informasi, serta pengaruh politik uang. Meskipun ada potensi peningkatan kesadaran politik masyarakat, pada kenyataannya, partisipasi politik di luar pemilu, seperti dalam pengawasan pemerintah daerah, masih sangat terbatas. Keterbatasan ini dipengaruhi oleh rendahnya pendidikan politik masyarakat, kurangnya akses informasi yang transparan, dan ketergantungan terhadap pemerintahan lokal.
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Kepemimpinan dan Partisipasi Masyarakat, Faktor eksternal, seperti media, pendidikan politik, dan peran partai politik, berperan penting dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat. Media dapat membentuk opini publik dan meningkatkan kesadaran politik, meskipun disinformasi dapat menurunkan kualitas diskursus politik. Pendidikan politik yang baik memungkinkan masyarakat lebih memahami hak-hak mereka dan mendorong mereka untuk berpartisipasi aktif. Partai politik juga memengaruhi tingkat partisipasi, karena dapat mencalonkan kandidat yang didukung oleh masyarakat. Faktor internal, seperti kesadaran politik individu, juga memainkan peran penting dalam mendorong partisipasi.
4. Hambatan dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Tantangan utama yang dihadapi dalam pemilihan kepala daerah langsung adalah praktik politik uang, yang mengurangi integritas dalam pemilihan dan berdampak pada kualitas pemimpin yang terpilih. Selain itu, adanya fragmentasi politik dan keterbatasan akses informasi juga menghambat pemilih dalam membuat keputusan yang tepat.

Secara keseluruhan, meskipun pemilihan kepala daerah langsung diharapkan membawa perbaikan dalam kualitas kepemimpinan dan partisipasi masyarakat, tantangan besar masih ada dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memperbaiki mekanisme pemilihan, meningkatkan transparansi, serta meningkatkan pendidikan politik masyarakat agar pemilihan kepala daerah langsung dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

**DAFTAR PUSTAKA**

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Amirudin dan A. Zaini Bisri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, PustakaPelajar, Yogyakarta, 2006

Andy Ramses, *Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-undang Nomor 22 tahun 1999*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003

Diane Revitch & Abigail Thernstrom (ed), *Demokrasi Klasik & Modern - Tulisan Tokoh-tokoh Pemikir Ulung Sepanjang Masa*, Yayasan Obor Indonesia, Yogyakarta, 2005

Dian Jani Pranita, dkk, *Strategi Kememimpinan*, Journal Corner and Publishing, Cilacap, Cetakan I 2023

Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, 1993

Hendra Nurtjahjo, *Filsafat Demokrasi*, Bumi Aksara Jakarta, 2006

Jimly assiddiqie, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah perubahan ke empat*, Depok: pusat studi hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

Juwita, dkk *Transparansi dan Integritas dalam Pemilihan Umum: Upaya Mencegah Kecurangan dan Manipulasi*, MADANI Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan Vol 15 No 3 (2023) : Desember 2023

Kholid O. Santoso (Ed.), *Mencari Demokrasi Gagasan dan Pemikiran*, Segi Arsy, Bandung, 2009

Milya Sari, "NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA, ISSN: 2715-470X ( Online ), 2477 - 6181 ( Cetak ) Penelitian Kepustakaan ( Library Research ) Dalam Penelitian Pendidikan IPA," 2020

Nick Hungtingtong, *Paradoks Demokrasi*, Yayasan Obor, Jakarta, 2005

Supriyadi Supriyadi, "Community of Practitioners: Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan," *Lentera Pustaka: Jurnal Kajian Ilmu Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan* 2, no. 2 (2017): 83, <https://doi.org/10.14710/lenpust.v2i2.13476>

Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

<https://bpmbkm.uma.ac.id/2024/02/29/peran-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik-dan-sikap-politik/>, di unduh pada hari minggu, 09-02-2025

<https://komunikasi.untag-sby.ac.id/web/beritadetail/pengaruh-media-massa-dalam-membentuk-opini-publik.html>, di unduh pada hari Senin, 10-02-2025